BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan tujuan mempermudah peneliti untuk menemukan cara yang sistematis dalam penyusunan dari segi konsep atau teori. Peneliti mengambil beberapa contoh penelitian sebagai bahan pembanding dengan penelitian sekarang.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meisita Mar Wilar, Agustinus B. Pati, dan Sofia E. Pengemanan (2021) meneliti Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian, Kecamatan Maesan, Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah desa memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kebijakan langsung, namun adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya dan kurang optimalnya pelaksanaan program secara berkelanjutan. Persamaan sama-sama meneliti peran pemerintah desa dalam program yang berkaitan dengan lansia dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Perbedaan penelitian Meisita, dkk. Tidak membahas Sekolah Lansia Tangguh secara spesifik dan belum mengkaji fungsi manajemen pemerintah desa (perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) sementara itu, penelitian ini akan mengkaji Fungsi manajemen pemerintah desa dalam pelaksanaan Sekolah Lansia Tangguh.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hilyah Maulidia, Budhi Setianto, dan Nur Hotimah (2023) meneliti Evaluasi Program Sekolah Lansia Tangguh Melalui Analisis SWOT di BKKBN Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program memiliki kekuatan pada dukungan pemerintah dan kader, namun kelemahan terletak pada kurangnya partisipasi lansia dan keterbatasan fasilitas. Persamaan sama-sama membahas Program Sekolah Lansia Tangguh dan pentingnya pengelolaan program. Perbedaan Penelitian Maulidia, dkk. berfokus pada evaluasi SWOT di Tingkat BKKBN, Sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen pemerintah desa sebagai pelaksana utama
3. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dela Ayu Windani & Weni Rosdiani (2025) meneliti Implementasi Kebijakan Program SELANTANG (Sekolah Lansia Tangguh) “Sri Rejeki” di Kelurahan Babatan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Standar dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya maksimal, anggaran perlu ditambah, komunikasi pengelola lansia kurang optimal, lingkungan ekonomi dan politik mendukung, serta partisipasi lansia laki-laki rendah. Persamaan sama-sama meneliti pelaksanaan Program Sekolah Lansia Tangguh, faktor pendukung dan penghambat, serta partisipasi lansia. Perbedaan Penelitian Windani, dkk. Berfokus pada implementasi kebijakan di Tingkat kelurahan, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada manajemen pemerintah desa dan fungsi manajemen secara sistematis.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan lansia sangat dipengaruhi oleh tata Kelola dan manajemen yang dilakukan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena berfokus pada fungsi manajemen pemerintah desa (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) dalam Pelaksanaan Sekolah Lansia Tangguh di Desa Sumberbrantas sebagai salah satu upaya pengembangan kesejahteraan lansia di Tingkat lokal.

Tabel: 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, Tahun	Hasil	Persamaan & Perbeda
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Meisita Mar Wilar, Agustinus B. Pati, & Sofia E. Pengemanan (2021) Dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian, Kecamatan Maesan, Kabupaten Minahasa Selatan".	Menunjukan bahwa Pemerintah desa memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kebijakan dan kegiatan langsung. Namun, terkendala berupa keterbatasan sumber daya dan kurang optimalnya pelaksanaan program secara berkelanjutan.	Persamaan: sama-sama meneliti peran pemerintah desa dalam program yang berkaitan dengan lansia dan peningkatanan kesejahteraan lanjut usia. Perbedaan: penelitian Meisita, dkk. Tidak membahas Sekolah Lansia Tangguh secara spesifik dan belum mengkaji fungsi manajemen pemerintah desa (perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) sementara itu, penelitian ini akan mengkaji Fungsi manajemen pemerintah desa dalam pelaksanaan Sekolah Lansia Tangguh.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Hilyah Maulidia,	Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Program Sekolah	Persamaan: sama-sama membahas Program Sekolah Lansia Tangguh

NO	Nama, Judul, Tahun	Hasil	Persamaan & Perbeda
	Budhi Setianto, & Nur Hotimah (2023) dengan judul penelitian "Evaluasi Program Sekolah Lansia Tangguh Melalui Analisis SWOT di BKKBN Provinsi Jawa Timur".	Lansia Tangguh memiliki kekuatan pada dukungan pemerintah dan kader, namun kelemahan terletak pada kurangnya partisipasi lansia dan keterbatasan fasilitas.	dan pentingnya pengelolaan program. Perbedaan: Penelitian Maulidia, dkk berfokus pada evaluasi SWOT di Tingkat BKKBN, Sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen pemerintah desa sebagai pelaksana utama
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Dela Ayu Windani & Weni Rosdiani (2025) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program SELANTANG (Sekolah Lansia Tangguh) "Sri Rejeki" di Kelurahan Babatan Kota Surabaya".	Standar dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya maksimal, anggaran perlu ditambah, komunikasi pengelola lansia kurang optimal, lingkungan ekonomi dan politik mendukung, serta partisipasi lansia laki-laki rendah.	Persamaan: sama-sama meneliti pelaksanaan Program Sekolah Lansia Tangguh, faktor pendukung dan penghambat, serta partisipasi lansia. Perbedaan: Penelitian Windani dkk. Berfokus pada implementasi kebijakan di Tingkat kelurahan, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada manajemen pemerintah desa dan fungsi manajemen secara sistematis.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2.2 Manajemen

2.2.1 Definisi Manajemen

Manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, istilah manajemen sering kali diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan

oleh manajer. Secara umum, manajemen mencakup proses perencanaan, pelaksanaan tindakan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajerial, tidak hanya untuk mencapai target tertentu, tetapi juga agar proses tersebut berlangsung secara efisien (tepat guna) dan efektif (tepat sasaran). Dalam konteks penelitian ini, manajemen digunakan sebagai kerangka untuk melihat bagaimana pemerintah desa mengelola program Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG) agar berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa pandangan yang dapat menjelaskan pemahaman tentang manajemen. Odway Tead dalam Rohman (2018:12), mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat lainnya adalah menurut Marry Parker Pollet dalam Rohman (2018:11), yang mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan Atmosudirdjo dalam Rohman (2018:12), manajemen diartikan sebagai proses pengendalian dan pemanfaatan sumber daya yang telah direncanakan untuk digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan sasaran kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya George R. Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan untuk mengorganisasikan individu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan melalui fungsi manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian.

Menurut Rohman (2018:9-10) berikut ini dipaparkan beberapa pandangan mengenai pengertian manajemen adalah:

1. Manajemen dipandang sebagai suatu proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui interaksi sumber daya – sumber daya dan pembagian tugas dengan professional.
2. Manajemen dipandang sebagai upaya-upaya yang dilakukan orang untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi melalui proses optimasi sumber daya manusia, material, dan keuangan.
3. Manajemen dipandang sebagai bentuk koordinasi dan pengintegrasian dari berbagai sumber daya (manusia dan cara) untuk menyelesaikan tujuan-tujuan khusus dan tujuan-tujuan yang bervariasi (umum).
4. Manajemen dipandang sebagai suatu bentuk kerja yang melingkupi koordinasi sumber daya-sumber daya manusia, tanah, tenaga kerja, dan modal untuk menyelesaikan target-target organisasi.

Berdasarkan teori manajemen menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. manajemen pemerintahan dapat diartikan sebagai cara sebuah organisasi mengatur pelaksanaan tugasnya agar berjalan efektif dan efisien. Hal ini dapat diterapkan dalam konteks Sekolah Lansia Tangguh, di mana pemerintah desa melakukan perencanaan dengan menetapkan tujuan program, seperti peningkatan kemandirian, kesehatan, dan partisipasi sosial lansia. Selanjutnya, pengorganisasian dilakukan dengan menyusun struktur pelaksana, membagi tugas antara guru, relawan, dan petugas desa, serta menyiapkan fasilitas dan jadwal kegiatan. Fungsi pelaksanaan terlihat pada pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, olahraga ringan, sosialisasi kesehatan, dan kegiatan sosial sesuai rencana.

Terakhir, pengawasan dilakukan dengan memantau jalannya program, mengevaluasi hasil kegiatan, serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga Sekolah Lansia Tangguh dapat memberikan manfaat maksimal bagi para lansia di desa.

2.2.2 Unsur-Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu elemen pokok yang harus ada didalamnya, manajemen tidak akan sempurna bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa kehadiran elemen-elemen pokok tersebut. Menurut George R. Terry dalam Rohman 2018:16) berpendapat dalam bukunya yang berjudul *principle of management*, bahwa ada enam unsur pokok yang terkandung dalam manajemen, diantaranya:

1. *Man and women* (manusia/orang)
2. *Materials* (material)
3. *Machines* (mesin)
4. *Methods* (metode/cara)
5. *money* (uang)
6. *Markets (pasar)*

2.2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen

Untuk mengatakan bahwa manajemen dijalankan secara baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka harus dilihat dari fungsi-fungsi yang berjalan secara baik. Menurut pandangan George R. Terry (1991) mengenai fungsi-fungsi manajemen lazim menggunakan POAC, yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan)

   Planning merupakan penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. (George R. Terry 1991:17).

   Wijayanti dalam Rohman (2018:29), memaparkan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dengan lebih lengkap yakni tidak sebatas pemilihan visi (misi), tujuan dan cara yang akan digunakan, *planning* juga harus meliputi penentuan kebijakan yang akan dijalankan, proyek, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan guna pencapaian tujuan tersebut.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

   Fungsi ini merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Fungsi organisasi ini sangat bergantung pada bentuk organisasi yang ada (George R. Terry 1991:17).

   Menurut Arifin dan Hadi W dalam Rohman (2018:31), menambahkan bahwa dalam *organizing*, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
   b. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, agar berjalan secara sistematis.

c. Pembagian tugas kepada elemen-elemen didalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan dan keahliannya.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating mencakup penetapan atau kegiatan yang dilakukan oleh *manager* untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang di tetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai (George R. Terry 1991: 17), *actuating* merupakan Langkah-langkah pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi *actuating* (menggerakan) menurut Sukwiaty, dkk dalam Rohman (2018:37), dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan

4. *Controlling* (Pengendalian/Pengawasan)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana serta pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercaapai dengan baik (George R. Terry 1991: 18)

Menurut Arifin & Hadi W dalam Rohman (2018:39), *controlling* (pengawasan) disebut juga sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Ada 4 hal penting yang diperhatikan dalam fungsi manajemen *controlling* yaitu:

a. Menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja;
b. Mengukur hasil kerja dengan standar yang ada;
c. Membandingkan prestasi dengan Langkah-langkah yang telah ditetapkan;
d. Mengambil Langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikihasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolak ukur.

Dalam penelitian ini, POAC digunakan sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana pemerintah desa menjalankan program SELANTANG secara sistematis.

2.3 Pemerintahan Desa

2.3.1 Arti Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kewenangan pemerintah desa dan perubahan dilanjutkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 kewenangan pemerintah desa di Undang-Undang ini yaitu:

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada desa;
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintahan kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa;
5. Pemerintah desa berwenang mengajukan rancangan peraturan desa;

6. Berwenang menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa;
7. Mempunyai wewenang untuk mengatur, membina kehidupan masyarakat dan perekonomian desa;
8. Pemerintah desa dapat mengkoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif;
9. Pemerintah desa berwenang untuk mewakili desanya dalam dan di luar pengadilan.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat paling bawah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menjelaskan bahwa, pemerintah desa adalah "Penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia". Sedangkan penyelenggaraanya adalah pemerintah desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintah desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsonalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Dengan demikian, pemerintahan desa dapat diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul serta adat istiadat setempat. Pemerintah desa juga memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembina kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, di dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, dan mewakili masyarakatnya. Dalam konteks Sekolah Lansia Tangguh, pemerintah desa berperan penting dalam aspek pemberdayaan dan dukungan kebijakan melalui penganggaran dana desa, koordinasi lintas sektor, dan pembinaan kader lansia.

2.3.2 Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi, dibantu oleh Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), serta Kepala Dusun (Kadus). Struktur ini berfungsi sebagai pelaksana administrasi, pelayanan publik, dan pelaksanaan kebijakan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur organisasi

pemerintah desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Struktur ini bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, terutama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan pembangunan, seperti kegiatan Sekolah Lansia Tangguh. Tugas dan Wewenang Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa memiliki tugas: Menyelenggarakan pemerintahan desa; Melaksanakan pembangunan desa; Pembinaan kemasyarakatan desa; dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Wewenang Pemerintah Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, serta kewenangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Kewenangan ini memberi ruang bagi desa untuk mengembangkan program inovatif, termasuk pemberdayaan lansia melalui program Sekolah Lansia Tangguh, sebagai bentuk tanggung jawab sosial desa dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.

2.4 Sekolah Lansia Tangguh

2.4.1 Pengertian Sekolah Lansia Tangguh

Sekolah Lansia Tangguh merupakan program pembelajaran nonformal yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, aktif, mandiri, produktif, dan tangguh dalam menghadapi perubahan sosial di masa tua. Menurut BKKBN (2021), Sekolah Lansia adalah wadah pembelajaran

sepanjang hayat bagi lansia agar dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mempertahankan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Konsep utama yang diterapkan dalam sekolah lansia adalah Pendidikan seumur hidup (*long life education*). Pendidikan ini tidak hanya berakhir saat seseorang mencapai usia dewasa, tetapi terus berlanjut sepanjang kehidupnya. Sekolah lansia ini tidak memerlukan Lembaga Pendidikan formal, tetapi dapat dilakukan melalui Pendidikan nonformal, seperti dilingkungan keluarga dan Masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kepribadian yang lebih baik.

Sekolah lansia merupakan usaha untuk memberikan informasi, pelatihan, dan kegiatan edukatif, keterampilan hidup, interaksi sosial, serta pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai bagian dari Upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan lansia (Widyaningsih et al., 2022). sekolah lansia ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kualitas hidup lansia agar mereka tetap bisa berperan aktif, mandiri, dan produktif dalam Masyarakat. Melalui program ini para lansia diberi kesempatan untuk terus belajar, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dilingkungan sosial mereka.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (2020) menjelaskan bahwa Sekolah Lansia Tangguh merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas lansia dalam menjaga kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Dengan demikian, Sekolah Lansia Tangguh dapat diartikan sebagai Lembaga pembelajaran non-formal yang berfokus pada pemberdayaan lansia agar tetap aktif dan memiliki daya tahan (tangguh) dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari.

2.4.2 Tujuan Sekolah Lansia Tangguh

Berdasarkan berita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar (2024), tujuan Sekolah Lansia Tangguh meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kegiatan kelompok BKL dalam mewujudkan Lansia Tangguh.
2. Meningkatkan pemahaman Lansia tentang konsep SMART dalam lingkup 7 Dimensi Lansia Tangguh (Spiritual, Fisik, Emosional, Intelektual, Sosial, Profesional Vokasional dan Lingkungan).
3. Meningkatkan Pengetahuan lansia tentang proses menua sehat dan sakit.
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku lansia tentang Kesehatan fisik dan mental.
5. Meningkatkan Pengetahuan, keterampilan dan perilaku lansia tentang kehidupan sosial dan ekonomi.
6. Meningkatkan Pengetahuan, keterampilan dan perilaku lansia tentang lingkungan yang mendukung kehidupan lansia.

2.5 Relevansi Sekolah Lansia Tangguh Dengan Manajemen POAC

Keberhasilan program Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG) sangat dipengaruhi oleh manajemen pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan

program tersebut. Program pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya pengelolaan yang sistematis di tingkat desa sebagai pelaksana utama. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengatur, membina, dan memberdayakan masyarakat, termasuk kelompok lansia, sehingga kualitas manajemen yang diterapkan akan berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mentransformasikan program dari pemerintah pusat, seperti program SELANTANG dari BKKBN, menjadi kegiatan nyata di tingkat lokal. Dalam menjalankan program SELANTANG, pemerintah desa perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang komprehensif sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu melalui fungsi *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* (POAC). Keempat fungsi ini saling berkaitan dan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan program.

Pada tahap perencanaan (*planning*), pemerintah desa melakukan identifikasi kebutuhan lansia, menetapkan sasaran program, serta menyusun kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Perencanaan yang tepat akan menentukan kesesuaian program dengan kebutuhan lansia, sehingga berpengaruh terhadap minat dan partisipasi mereka dalam mengikuti kegiatan. Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), pemerintah desa membentuk struktur pelaksana dengan melibatkan aparatur desa, Tim Penggerak PKK, kader Bina Keluarga Lansia (BKL), serta pihak terkait lainnya. Pengorganisasian yang jelas akan mempermudah koordinasi antar pelaksana dan

meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan (*actuating*), pemerintah desa berperan dalam menggerakkan partisipasi lansia, memotivasi kader pendamping, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Keberhasilan pada tahap ini sangat menentukan keterlibatan aktif lansia dalam mengikuti program SELANTANG. Pada tahap pengawasan (*controlling*), pemerintah desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk tingkat kehadiran lansia serta kendala yang dihadapi di lapangan. Pengawasan yang baik akan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan serta menjadi dasar dalam perbaikan program agar lebih efektif di masa mendatang.

Dengan demikian, penerapan fungsi manajemen (POAC) oleh pemerintah desa Sumberbrantas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG), khususnya dalam meningkatkan partisipasi lansia. Semakin optimal fungsi manajemen dijalankan, maka semakin besar peluang tercapainya tujuan program dalam meningkatkan kualitas hidup lansia.